



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Juni 2020

Halaman: 4

Ketetapan PBB 2020 Kembali seperti 2019

Rekomendasi DPRD Kota Jogja ke Pemkot Jogja

JOGJA, Radar Jogja - Nilai ketetapan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kota Jogja tahun ini direkomendasikan dikembalikan seperti tahun lalu. Itu berdasarkan evaluasi DPRD Kota Jogja atas pelaksanaan hasil rapat koordinasi antara DPRD Kota Jogja dan Pemkot Jogja 2 Maret lalu.

Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko mengatakan, kesepakatan dari rapat gabungan Komisi A dan Komisi B DPRD Kota Jogja, Senin (15/6) sore merekomendasikan nilai ketetapan PBB 2020 ini dikembalikan seperti angka tahun lalu. Itu berdasarkan evaluasi pendapat pemkot selama pandemi ini. Serta regulasi terkait kenaikan ketetapan PBB yang belum sempurna. "Rekomendasinya nilai ketetapan PBB tahun ini disamakan dengan 2019," katanya kemarin (16/6).

Danang menjelaskan, tindakan lanjut yang dilakukan Komisi A dan Komisi B paska rapat koordinasi 2 Maret lalu. Komisi A yang bermitra dengan Kantor Pertanahan Kota Jogja terkait zona nilai tanah yang menjadi ketentuan dasar perhitungan nilai jual obyek pajak masih debatable.

Begitupula Komisi B. Berdasarkan rapat kerja dengan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Jogja, karena pandemi korona ini potensi pendapatan asli daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD 2020 ini tidak bisa terealisasi 100 persen. Menurut Danang, kenaikan ketetapan PBB untuk lebih dari 90 ribu wajib pajak pun dinilai tidak jelas perbedaannya dengan tahun lalu. Ada yang kenaikannya signifikan. Tapi ada pula yang tetap. "Sekaligus untuk mem-

bantu warga terdampak korona, supaya kondisi ekonomi mereka tidak terbebani," ungkapnya.

Dalam rapat koordinasi Maret lalu, juga sudah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan kebijakan afirmatif. Yakni masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PBB mengajukan keringanan. Terkait hal itu, pemkot juga mengeluarkan Perwal Nomor 96 tahun 2019 dan Kepwal Nomor 515 tahun 2019 tentang penetapan besaran pemberian stimulus. Permohonan pengajuan keringanan masih dilayani hingga akhir Juni ini.

Danang mengatakan, hasil rekomendasi rapat gabungan Komisi A dan Komisi B itu pun masih akan ditindaklanjuti dengan Pemkot Jogja. Dalam waktu dekat akan segera mengundang pemkot untuk membahasnya. "Baru hari ini (kemarin) saya tanda tangani rekomendasinya dan masih akan dibahas dalam pertemuan dengan eksekutif (Pemkot)," tutur Danang.

Sementara itu anggota Komisi B DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto menambahkan, dalam rapat gabungan tersebut juga membahas terkait ketetapan PBB 2021. Menurut dia, tahun depan masih dalam proses pemulihan perekonomian. Hasilnya, kalangan legislator akan mengamandemen Perda nomor 2 Tahun 2011 terkait PBB Perkotaan dan Pedesaan sehingga koefisien pembagiannya tidak sebesar tahun ini. Selain itu juga mendorong pemkot untuk melakukan MoU dengan badan pertanahan nasional dalam menentukan nilai bidang tanah atau peta bidang. "Yang diblayai dengan APBD Kota Jogja," tuturnya.

Ketika dikonfirmasi Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengaku, belum mengetahui terkait hasil rekomendasi rapat gabungan DPRD Kota Jogja tersebut. Hasilnya belum diterima pemkot. "Saya belum tahu," ujarnya. (pra/bah/rg)

☐ Positif

☐ Segera

☐ Untuk Dik

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005